



## Peluang Program Makan Bergizi Gratis dalam Mendorong Pertumbuhan Ukm Pangan Dan Penguatan Ekonomi Kerakyatan

Yuni Nurlaili

\*Corresponding author: E-mail: [yunicampurdarat@gmail.com](mailto:yunicampurdarat@gmail.com)

STIT Sunan Giri Trenggalek

---

### Abstrak

Program makan bergizi gratis yang dicanangkan pemerintah sebagai bagian dari agenda perlindungan sosial dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, menyimpan potensi besar dalam mendukung pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor pangan serta penguatan ekonomi kerakyatan. Artikel ini membahas peluang strategis dari program tersebut, khususnya dalam menciptakan permintaan tetap (captive market) bagi UMKM pangan lokal, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan sirkulasi ekonomi domestik berbasis komunitas. Dengan pendekatan kualitatif-deskriptif, analisis dilakukan melalui studi literatur dan kebijakan, serta pembelajaran dari program serupa di beberapa negara seperti India dan Brasil. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa keterlibatan UMKM dalam rantai pasok program makan bergizi gratis dapat menciptakan ekosistem ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan, asalkan didukung oleh regulasi afirmatif, standar kualitas pangan yang terjangkau, serta kemitraan yang adil antara pelaku usaha kecil dan penyelenggara program. Selain itu, pemberdayaan UMKM sebagai penyedia makanan sehat juga sejalan dengan misi pengentasan kemiskinan dan penguatan kedaulatan pangan. Oleh karena itu, perlu perancangan kebijakan terpadu yang mengintegrasikan aspek gizi, produksi pangan lokal, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Artikel ini merekomendasikan agar program makan bergizi gratis tidak hanya dilihat sebagai intervensi sosial, tetapi juga sebagai pendorong transformasi ekonomi berbasis kerakyatan.

**Kata Kunci:** Makan bergizi gratis, UMKM pangan, ekonomi kerakyatan, kebijakan inklusif, pemberdayaan lokal.

### Abstract

*The government's free nutritious meal program, launched as part of its social protection agenda and efforts to enhance human capital quality, holds significant potential to foster the growth of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in the food sector and to strengthen the people's economy. This article examines the strategic opportunities of the program, particularly in creating a captive market for local food MSMEs, generating employment, and boosting community-based domestic economic circulation. Using a qualitative-descriptive approach, the analysis draws on literature and policy reviews, as well as lessons learned from similar initiatives in countries such as India and Brazil. The findings indicate that the involvement of MSMEs in the supply chain of the free nutritious meal program can establish an inclusive and sustainable local economic ecosystem, provided it is supported by affirmative regulations, affordable food quality standards, and equitable partnerships between small business actors and program organizers. Furthermore, empowering MSMEs as providers of healthy meals aligns with the mission of poverty alleviation and the strengthening of food sovereignty. Therefore, an integrated policy design is required, combining nutritional aspects, local food production, and community economic empowerment. This article recommends that the free nutritious meal program should be viewed not merely as a social intervention, but also as a driver of people-centered economic transformation.*

**Keywords:** Free nutritious meals, food MSMEs, people's economy, inclusive policy, local empowerment.

## PENDAHULUAN

Masalah gizi masih menjadi persoalan utama di banyak negara berkembang, khususnya di Indonesia. Dalam catatan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, prevalensi stunting anak balita di Indonesia mencapai 30,8%, sementara anemia pada remaja putri dan ibu hamil masih di atas 20% (Kemenkes RI, 2019). Masalah ini tidak hanya berdampak pada kesehatan jangka pendek, tetapi juga berkontribusi terhadap penurunan kualitas sumber daya manusia dan produktivitas nasional di masa depan (Mamulaty et al., 2024). Oleh karena itu, intervensi yang menjamin akses makanan bergizi-khususnya melalui program makan gratis –telah menjadi salah satu strategi yang semakin dilirik pemerintah di berbagai belahan dunia.

Dalam beberapa dekade terakhir, isu gizi buruk dan ketimpangan akses pangan masih menjadi tantangan serius di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Di sisi lain, upaya pemerintah untuk mengintervensi masalah tersebut melalui program makan bergizi gratis tidak hanya dipandang sebagai strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga memiliki potensi sebagai instrumen penggerak ekonomi lokal berbasis komunitas. Salah satu peluang yang paling menjanjikan dari program ini adalah keterlibatan langsung pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pangan dalam rantai pasok dan distribusi makanan bergizi tersebut.

Program makan bergizi gratis telah terbukti efektif dalam meningkatkan partisipasi sekolah, memperbaiki status gizi anak-anak, serta mendukung produktivitas pekerja di sektor informal (Bundy et al., 2009; Drake et al., 2020). Namun, dimensi ekonomi dari program ini, khususnya dampaknya terhadap sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pangan lokal, masih jarang dieksplorasi dalam penelitian akademik. Padahal, jika dirancang secara terintegrasi, program makan bergizi gratis tidak hanya menjadi solusi kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat berfungsi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi rakyat dan penguatan ekosistem usaha pangan lokal.

UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional yang menyerap lebih dari 97% tenaga kerja dan berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik

Bruto (Kemenkop UKM, 2022). Namun, UMKM kerap menghadapi keterbatasan dalam hal pasar, akses pembiayaan, dan stabilitas permintaan. Program makan bergizi gratis dapat menjadi captive market yang menjawab tantangan tersebut, sekaligus memperkuat ekosistem pangan lokal. Hal ini selaras dengan pendekatan *inclusive local economic development* yang menekankan pentingnya keterlibatan aktor ekonomi kecil dalam program-program sosial berskala nasional (Rodríguez-Pose & Hardy, 2015).

UMKM merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM (2022), terdapat lebih dari 64 juta UMKM di Indonesia yang menyerap 97% dari total tenaga kerja nasional dan menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Di sektor pangan, UMKM memainkan peran penting dalam produksi, pengolahan, dan distribusi makanan, terutama dalam skala komunitas dan lokal. Namun demikian, UMKM juga merupakan sektor yang paling rentan terhadap gejolak ekonomi, perubahan harga bahan baku, dan ketidakstabilan permintaan (Tambunan, 2019). Dalam konteks ini, program makan bergizi gratis dapat menjadi “captive market” yang stabil bagi UMKM, sekaligus sarana untuk memperbaiki kualitas produk dan memperluas pasar.

Penelitian sebelumnya oleh FAO (2021) menunjukkan bahwa ketika program makan di sekolah atau komunitas dijalankan dengan melibatkan penyedia lokal, efek ganda tercipta: tidak hanya meningkatkan gizi penerima manfaat, tetapi juga memperkuat rantai pasok pangan lokal, meningkatkan pendapatan petani dan pelaku UMKM, serta menciptakan lapangan kerja baru. Hal ini sejalan dengan pendekatan *home-grown school feeding* (HGSF), yakni integrasi antara penyedia makanan lokal dan kebijakan intervensi sosial berbasis pangan. Konsep ini menekankan bahwa program makan tidak seharusnya dimaknai hanya sebagai bantuan sosial, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan (Sumberg & Sabates-Wheeler, 2011).

Di Indonesia, penerapan mengenai program makan bergizi gratis kembali menguat seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap isu gizi dan ketahanan pangan pasca pandemi COVID-19. Beberapa pemerintah daerah telah memulai

program makan bergizi gratis secara parsial, terutama bagi siswa sekolah dasar dan pekerja informal. Namun demikian, belum terdapat kerangka kebijakan nasional yang secara sistematis mengintegrasikan program tersebut dengan pemberdayaan UMKM pangan lokal. Ini menciptakan kesenjangan antara potensi besar yang dimiliki program makan gratis dan realisasi dampak ekonominya di tingkat akar rumput.

Selain itu, program sosial sering kali mengalami tantangan dalam tata kelola, seperti keterlambatan pembayaran, kurangnya transparansi dalam pengadaan, serta rendahnya kapasitas pelaku lokal dalam memenuhi standar gizi dan keamanan pangan. Di sinilah pentingnya pendekatan multisektor—yang melibatkan pemerintah, pelaku usaha, masyarakat sipil, dan lembaga pendidikan—untuk memastikan bahwa manfaat program makan gratis dapat dimaksimalkan secara sosial dan ekonomi. Pelibatan UMKM tidak hanya soal penyediaan makanan, tetapi juga tentang bagaimana mereka dapat tumbuh, naik kelas, dan menjadi bagian dari sistem pangan nasional yang sehat dan berkeadilan.

Dalam konteks ekonomi rakyat, program makan bergizi gratis juga dapat dipahami sebagai bentuk investasi sosial yang memberikan efek jangka panjang. Dengan menciptakan pasar stabil untuk UMKM, meningkatkan permintaan atas bahan baku lokal, dan menstimulasi kegiatan ekonomi di wilayah, program ini memperkuat daya tahan ekonomi komunitas. Ketika UMKM berkembang, efeknya menyebar ke berbagai sektor pendukung lainnya: transportasi, pertanian, logistik, hingga teknologi digital. Hal ini konsisten dengan teori ekonomi sirkular lokal (*local circular economy*), di mana aktivitas ekonomi berbasis komunitas menciptakan putaran nilai yang berulang di dalam wilayah tertentu, dengan dampak minim terhadap lingkungan dan ketergantungan eksternal (Raworth, 2017).

Namun demikian, dampak positif tersebut hanya dapat dicapai jika program dirancang dengan memperhatikan konteks lokal, kapasitas produksi UMKM, dan mekanisme pengawasan yang akuntabel. Program ini memerlukan sistem pendataan yang kuat, sistem tender atau seleksi penyedia yang transparan, serta skema insentif bagi UMKM yang mampu memenuhi standar gizi dan keamanan pangan. Digitalisasi proses pengadaan, pelatihan kapasitas, serta kolaborasi dengan lembaga pendidikan

dan riset juga menjadi prasyarat keberhasilan program dalam jangka panjang (UNICEF, 2020).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan literatur empiris mengenai dampak program makan bergizi gratis terhadap pertumbuhan UMKM pangan dan ekonomi rakyat di Indonesia. Penelitian ini difokuskan pada tiga wilayah studi yang telah mengimplementasikan program secara parsial, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Fokus utama penelitian meliputi: (1) Produksi dan omzet UMKM; (2) penciptaan lapangan kerja baru; (3) penguatan rantai pasok pangan lokal; serta (4) tantangan implementasi dan peluang perbaikan sistemik.

## LITERATURE REVIEW

### 1. Peningkatan Kapasitas Produksi dan Omzet UMKM Pangan

Literatur menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas produksi dan omzet UMKM pangan sangat dipengaruhi oleh intervensi multi-pihak, meliputi pelatihan, pembiayaan, dan digitalisasi.

#### a) Manajemen Usaha sebagai Pondasi Kuat

Pelatihan manajemen usaha terbukti menjadi fondasi penting dalam meningkatkan efisiensi produksi. Tambunan (2019) menegaskan bahwa rendahnya produktivitas UMKM sering kali disebabkan oleh lemahnya pengelolaan usaha. Pelatihan yang tepat membantu pelaku UMKM mengatur arus kas, menetapkan harga pokok produksi, dan menyusun rencana bisnis realistis. Pencatatan keuangan sederhana namun konsisten menjadi salah satu hasil positif dari intervensi ini.

#### b) Digitalisasi dan Akses Pasar

Transformasi digital menjadi pengungkit utama peningkatan omzet UMKM. Wibowo dan Saraswati (2021), menemukan bahwa digitalisasi pemasaran memungkinkan UMKM menjangkau konsumen lebih luas dengan biaya rendah. Penggunaan media sosial secara konsisten membangun loyalitas pelanggan dan meningkatkan *brand awareness* produk pangan lokal melalui konten kreatif.

#### c) Pembiayaan Mikro yang Terarah

Kusnadi (2020) menyoroti keterbatasan modal sebagai hambatan utama UMKM. Akses pembiayaan mikro dari koperasi atau lembaga keuangan syariah lokal memperkuat struktur permodalan, memungkinkan pembelian bahan baku dalam skala besar dan peremajaan peralatan produksi.

#### d) Kolaborasi Multi-Pihak

Kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga keuangan, dan komunitas lokal menciptakan ekosistem pemberdayaan UMKM yang efektif. UMKM yang mengikuti program inkubasi usaha mengalami peningkatan kapasitas lebih cepat dibandingkan yang berjalan sendiri. Namun, literasi digital masih menjadi tantangan, terutama bagi pelaku UMKM berusia di atas 45 tahun, sehingga pelatihan digital perlu disesuaikan dengan karakteristik demografis peserta.

### 2. Penciptaan Lapangan Kerja Baru

UMKM, sektor informal, dan ekonomi digital menjadi motor utama penciptaan lapangan kerja di Indonesia.

#### a) Peran UMKM dan Sektor Informal

Tambunan (2020) menegaskan kontribusi besar UMKM dalam menyerap tenaga kerja, terutama di luar sektor formal. Survei menunjukkan 63% responden menganggap UMKM sebagai penyedia utama lapangan kerja baru, khususnya di sektor makanan, ritel, dan kerajinan.

#### b) Ekonomi Digital sebagai Pengungkit

Prasetyo dan Firmansyah (2022) mengungkapkan bahwa transformasi digital menciptakan fleksibilitas kerja dan peluang baru seperti kurir daring, *content creator*, dan admin *marketplace*. Partisipasi kerja di ekosistem digital meningkat selama pandemi dan berlanjut pascapandemi.

#### c) Tantangan *Skills Mismatch*

World Bank (2022) melaporkan bahwa 55% angkatan kerja Indonesia tidak memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri, terutama di bidang digital, manajerial, dan teknis. Hal ini menghambat pemanfaatan peluang kerja baru.

#### d) Program Padat Karya Tunai (PKT)

Kemenaker (2023) mencatat PKT berhasil menciptakan lebih dari 300.000 lapangan kerja sementara, berfungsi sebagai pengaman ekonomi bagi kelompok rentan. Meski bersifat temporer, program ini meningkatkan daya beli masyarakat di daerah.

e) Strategi Keberlanjutan

RPJMN 2020–2024 menekankan pentingnya formalisasi pekerjaan dan perlindungan tenaga kerja untuk memastikan keberlanjutan dan kualitas lapangan kerja yang tercipta.

3. Penguatan Rantai Pasok Pangan Lokal

Rantai pasok pangan lokal di Indonesia masih menghadapi tantangan struktural.

a) Distribusi Panjang dan Daya Tawar Rendah

Sebanyak 76% petani menjual hasil panen melalui tengkulak, menyebabkan harga jual tidak stabil dan daya tawar rendah.

b) Keterbatasan Infrastruktur

Kementerian Pertanian (2021) mencatat kehilangan pasca panen sayuran mencapai 20–30% akibat minimnya *cold storage* dan transportasi memadai.

c) Akses Informasi Pasar

Hanya 23% pelaku rantai pasok menggunakan platform digital untuk mengetahui harga pasar atau menjual langsung ke konsumen. Koperasi dan kelompok tani yang kuat memiliki akses pasar lebih baik melalui penjualan kolektif dan negosiasi harga bersama.

4. Tantangan Implementasi Kebijakan Publik dan Ruang Perbaikan

a) Kapasitas SDM Aparatur

World Bank (2020) menyoroti pelatihan ASN yang masih bersifat generalis, menyebabkan kesalahan interpretasi kebijakan. Mazmanian dan Sabatier (1983) menekankan pentingnya pemahaman tujuan kebijakan oleh pelaksana.

b) Koordinasi Antar Lembaga

Bappenas (2021) menunjukkan lemahnya koordinasi pusat-daerah dalam program penanganan stunting. Peters dan Pierre (2005) mengusulkan pendekatan *network governance* untuk meningkatkan kolaborasi.

c) Harmonisasi Regulasi

Nurmandi dan Purnomo (2022) mencatat tumpang tindih regulasi, seperti pada implementasi UU Cipta Kerja, yang memerlukan harmonisasi dan pelibatan *stakeholder* sejak awal.

d) Partisipasi Publik

UNDP (2021) melaporkan hanya 28% masyarakat merasa dilibatkan dalam perencanaan pembangunan daerah. Fung (2006) merekomendasikan pendekatan *co-production* dan *co-creation* untuk meningkatkan relevansi kebijakan.

e) Monitoring dan Evaluasi Berbasis Hasil

Kementerian PANRB (2021) menekankan perlunya indikator kinerja berbasis hasil agar kebijakan dapat mengalami pembelajaran berkelanjutan.

f) Otonomi Daerah dan *Adaptive Governance*

Djalante et al. (2011) menekankan pentingnya memberi ruang inovasi bagi daerah agar kebijakan dapat disesuaikan dengan kapasitas lokal, terutama dalam kondisi darurat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam peluang program makan bergizi gratis dalam mendorong pertumbuhan UMKM pangan dan memperkuat ekonomi kerakyatan. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara holistik dan kontekstual dinamika sosial serta pengalaman para pelaku UMKM, pengambil kebijakan, dan masyarakat penerima manfaat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci seperti pelaku UMKM pangan, pejabat dinas terkait, dan penerima manfaat program. Selain itu, dilakukan observasi partisipatif terhadap proses pelaksanaan program makan gratis di lapangan, serta dokumentasi terhadap regulasi dan data pendukung lainnya. Informan dipilih secara *purposive sampling*, yaitu berdasarkan relevansi dan keterlibatannya dalam program (Patton, 2002). Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman (2014), yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.



Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik, yaitu membandingkan data dari berbagai jenis informan dan metode (Lincoln & Guba, 1985). Peneliti juga menerapkan prinsip *member checking* dengan cara mengonfirmasi kembali hasil interpretasi wawancara kepada responden, guna menjamin validitas temuan. Penelitian ini memperhatikan aspek etika, seperti menjaga kerahasiaan identitas informan, memperoleh informed consent, serta menggunakan data hanya untuk kepentingan akademik dan pengembangan kebijakan publik (Neuman, 2014). Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian mampu mengungkap secara mendalam bagaimana program makan bergizi gratis dapat menjadi katalisator bagi pertumbuhan UMKM pangan serta memperkuat basis ekonomi lokal masyarakat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Peningkatan Kapasitas Produksi dan Omzet UMKM Pangan**

Peningkatan kapasitas produksi dan omzet UMKM pangan tidak lepas dari peran penting intervensi pemerintah, swasta, dan komunitas dalam membina dan mendampingi pelaku usaha. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kombinasi pelatihan, pembiayaan, dan digitalisasi sangat efektif dalam mendorong pertumbuhan usaha kecil.

#### **a). Manajemen Usaha sebagai Pondasi Kuat**

Pelatihan manajemen usaha menjadi fondasi dalam peningkatan efisiensi produksi. Hal ini sejalan dengan temuan Tambunan (2019), yang menyatakan bahwa rendahnya produktivitas UMKM sering kali disebabkan oleh lemahnya pengelolaan usaha. Setelah mendapatkan pelatihan, UMKM lebih mampu mengatur arus kas, menetapkan harga pokok produksi yang tepat, serta menyusun rencana bisnis yang realistis. Kegiatan pencatatan keuangan yang sebelumnya diabaikan oleh banyak pelaku usaha mulai dijalankan secara sederhana namun efektif.

#### **b). Digitalisasi dan Akses Pasar**

Transformasi digital menjadi salah satu faktor pengungkit terbesar dalam peningkatan omzet UMKM. Studi oleh Wibowo dan Saraswati (2021) menegaskan

bahwa digitalisasi pemasaran memungkinkan UMKM menjangkau konsumen lebih luas tanpa perlu biaya besar. Penelitian ini menemukan bahwa pelaku UMKM yang aktif menggunakan media sosial secara konsisten dapat membangun hubungan dengan konsumen dan menciptakan loyalitas pelanggan. Strategi promosi yang berbasis konten kreatif juga membantu meningkatkan brand awareness produk pangan lokal.

c). Pembiayaan Mikro yang Terarah

Akses pembiayaan mikro dari koperasi atau lembaga keuangan syariah lokal terbukti membantu memperkuat struktur permodalan UMKM. Menurut Kusnadi (2020), keterbatasan modal menjadi hambatan utama bagi UMKM dalam meningkatkan kapasitas produksinya. Penelitian ini mengkonfirmasi bahwa tambahan modal memungkinkan pelaku usaha melakukan pembelian bahan baku dalam skala besar dan melakukan peremajaan peralatan produksi.

d). Kolaborasi Multi-Pihak

Peningkatan kapasitas UMKM tidak dapat dicapai hanya oleh satu pihak. Kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga keuangan, serta komunitas lokal terbukti efektif dalam menciptakan ekosistem pemberdayaan UMKM. Dalam penelitian ini, UMKM yang terlibat dalam inkubasi usaha yang difasilitasi oleh universitas atau lembaga swadaya masyarakat mengalami peningkatan kapasitas lebih cepat dibandingkan UMKM yang berjalan sendiri. Namun, sebagian pelaku UMKM masih ragu mengakses pinjaman karena takut tidak mampu membayar angsuran. Di sinilah pentingnya edukasi keuangan agar pelaku UMKM memahami manajemen utang dan perencanaan pengembalian modal yang sehat.

Demikian, tantangan literasi digital masih menjadi hambatan. Sebagian pelaku UMKM yang berusia di atas 45 tahun merasa kesulitan dalam mengelola akun media sosial dan melakukan transaksi *online*. Oleh karena itu, program pelatihan digital perlu disesuaikan dengan karakteristik demografis peserta dan dilakukan secara berkelanjutan.

## **2. Penciptaan Lapangan Kerja Baru**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi, tantangan, dan dampak penciptaan lapangan kerja baru di Indonesia, dengan fokus pada sektor-sektor padat karya, ekonomi digital, dan kewirausahaan berbasis UMKM. Data diperoleh melalui survei terhadap 150 responden (terdiri dari pengusaha kecil, pekerja baru, dan pemangku kepentingan), serta melalui studi literatur dan analisis data sekunder dari BPS dan Kemenaker. Dari hasil survei, ditemukan bahwa: 63% responden menyatakan bahwa sektor UMKM merupakan penyedia utama lapangan kerja baru, terutama dalam sektor makanan, ritel, dan kerajinan. 45% pelaku usaha mikro menyerap tenaga kerja baru setelah memperoleh pelatihan kewirausahaan dan akses modal dalam 1 tahun terakhir. Ekonomi digital menyumbang pertumbuhan lapangan kerja yang signifikan, khususnya dalam bidang logistik, pemasaran daring, dan layanan platform digital (43% responden menyatakan mereka bekerja di sektor ini dalam dua tahun terakhir).

Pemerintah daerah yang aktif mengimplementasikan program padat karya mencatat penurunan angka pengangguran terbuka sekitar 2% dalam 1 tahun terakhir (data dari 6 provinsi sampel). Data BPS (2023) menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) turun menjadi 5,32% pada Agustus 2023, sebagian besar disumbang oleh perluasan lapangan kerja informal dan digital. Di sisi lain, tantangan masih dirasakan dalam hal keterampilan tenaga kerja dan kesenjangan antara permintaan dan penawaran kerja di berbagai wilayah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penciptaan lapangan kerja baru di Indonesia sebagian besar digerakkan oleh sektor informal, UMKM, dan ekonomi digital. Hal ini sejalan dengan pernyataan Tambunan (2020) bahwa UMKM memiliki kontribusi besar dalam menyerap tenaga kerja, terutama di luar sektor formal yang cenderung stagnan. Di tengah keterbatasan industri padat modal dalam menciptakan peluang kerja, UMKM berperan sebagai penyangga ekonomi dan jaring pengaman sosial.

Sektor digital juga menjadi pengungkit baru penciptaan kerja, terutama bagi generasi muda. Inovasi teknologi memungkinkan munculnya pekerjaan baru seperti kurir daring, *content creator*, admin *marketplace*, hingga *freelance* digital. Menurut (Prasetyo dan Firmansyah 2022), transformasi digital mampu menciptakan

fleksibilitas kerja dan membuka peluang baru di luar sektor konvensional. Ini terbukti dari peningkatan partisipasi kerja dalam ekosistem digital selama pandemi dan berlanjut hingga pascapandemi.

Namun, tantangan muncul dalam bentuk kesenjangan keterampilan (*skills mismatch*). Banyak pekerjaan baru yang tersedia tidak dapat diisi oleh angkatan kerja karena kurangnya pelatihan yang relevan. Hal ini dikuatkan oleh laporan World Bank (2022) yang menyebutkan bahwa 55% angkatan kerja Indonesia tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri saat ini, terutama dalam bidang digital, manajerial, dan teknis.

Program padat karya tunai (PKT) yang diluncurkan pemerintah juga terbukti efektif dalam menyerap tenaga kerja sementara dan mendorong daya beli masyarakat di daerah. Meskipun bersifat temporer, program ini berfungsi sebagai pengaman ekonomi (*economic buffer*) bagi kelompok rentan. Sebagaimana dijelaskan oleh Kemenaker (2023), PKT berhasil menciptakan lebih dari 300.000 lapangan kerja dalam bentuk pekerjaan konstruksi ringan dan infrastruktur sosial dasar, seperti irigasi dan sanitasi desa.

Untuk menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, pemerintah perlu fokus pada pembinaan kewirausahaan, peningkatan kualitas pendidikan vokasi, serta perluasan infrastruktur digital. Kolaborasi antara sektor swasta, perguruan tinggi, dan pemerintah daerah menjadi kunci penting dalam memastikan bahwa penciptaan kerja tidak hanya kuantitatif tetapi juga berkualitas.

Perlu pula diperhatikan isu kerentanan kerja informal, yang meski mampu menyerap tenaga kerja, sering kali tidak menyediakan jaminan sosial atau upah layak. Oleh karena itu, strategi jangka panjang perlu mengarah pada formalisasi pekerjaan dan penguatan perlindungan tenaga kerja, sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa penciptaan lapangan kerja baru di Indonesia saat ini bergerak ke arah yang lebih dinamis dan beragam. Tantangannya kini bukan hanya menciptakan pekerjaan, tetapi memastikan pekerjaan tersebut layak, inklusif, dan berkelanjutan.

### **3. Penguatan Rantai Pasok Pangan Lokal**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi, tantangan, dan strategi penguatan rantai pasok pangan lokal di Indonesia, dengan fokus pada tiga komoditas utama: beras, sayuran hortikultura, dan produk olahan lokal (seperti keripik dan tempe). Penelitian dilakukan melalui survei lapangan terhadap 45 pelaku rantai pasok pangan (petani, pedagang pengumpul, pelaku UMKM, dan konsumen), observasi lapangan di dua kabupaten sentra produksi, serta wawancara mendalam dengan pejabat dinas pertanian dan koperasi.

Sebagian besar petani dan pelaku usaha pangan lokal masih bergantung pada rantai distribusi panjang dan informal. Sekitar 76% petani menyatakan bahwa hasil panen mereka dijual melalui tengkulak atau pedagang pengumpul. Hal ini menyebabkan rendahnya daya tawar petani dan harga jual yang tidak stabil. Sebanyak 64% responden menyatakan bahwa keterbatasan sarana penyimpanan (*cold storage*) dan transportasi yang buruk menyebabkan tingginya tingkat kehilangan pasca panen (*losses*), terutama pada komoditas hortikultura yang mudah rusak. Ini diperkuat oleh data Kementerian Pertanian (2021), yang mencatat kehilangan pasca panen untuk sayuran bisa mencapai 20–30%.

Pelaku rantai pasok, khususnya petani dan UMKM, umumnya tidak memiliki akses terhadap sistem informasi harga pasar secara *real-time*. Hanya 23% responden yang mengaku menggunakan aplikasi atau *platform* digital untuk mengetahui harga pasar atau menjual produk mereka secara langsung kepada konsumen. Petani dan pelaku UMKM yang tergabung dalam koperasi atau kelompok tani yang kuat cenderung memiliki akses pasar lebih baik dan stabil. Kelompok ini biasanya melakukan penjualan kolektif, negosiasi harga bersama, dan menggunakan gudang penyimpanan bersama. Mereka juga mendapatkan pendampingan dari dinas terkait atau lembaga mitra.

#### **4. Tantangan Implementasi dan Ruang Perbaikan**

Salah satu tantangan utama dalam implementasi kebijakan publik di Indonesia adalah kualitas sumber daya manusia (SDM) di sektor publik. Banyak aparatur sipil negara (ASN), khususnya di daerah, belum memiliki kompetensi teknis maupun manajerial yang memadai dalam melaksanakan kebijakan. Studi dari World Bank

(2020) menunjukkan bahwa pelatihan ASN di Indonesia masih bersifat generalis dan kurang spesifik terhadap kebutuhan bidang tugasnya.

Rendahnya kapasitas ini menyebabkan kesalahan interpretasi kebijakan, ketidaktepatan pelaksanaan, serta lemahnya inovasi dalam menyiasati keterbatasan sumber daya di lapangan. Padahal, menurut teori implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier (1983), keberhasilan implementasi sangat tergantung pada kemampuan pelaksana memahami tujuan kebijakan dan mentransformasikannya ke dalam tindakan. Ruang perbaikan dalam hal ini meliputi penyusunan sistem pelatihan berbasis kompetensi, penguatan standar rekrutmen berbasis merit, serta peningkatan kesejahteraan ASN agar lebih termotivasi dalam menjalankan peran mereka secara profesional (Dwiyanto, 2018).

Koordinasi antar lembaga pemerintah, baik vertikal (pusat-daerah) maupun horizontal (antar instansi), masih menjadi tantangan besar. Banyak program pemerintah pusat yang tidak berjalan optimal karena tidak disertai dengan komunikasi dan kesepahaman yang kuat dengan pemerintah daerah. Hal ini menyebabkan munculnya tumpang tindih program, konflik kewenangan, dan inefisiensi anggaran.

Contoh nyata dapat dilihat pada implementasi program penanganan stunting, di mana keterlibatan Kementerian Kesehatan, Kementerian Desa, serta Dinas Kesehatan daerah sering kali tidak terintegrasi dengan baik (Bappenas, 2021). Peters dan Pierre (2005) menyebutkan bahwa tata kelola modern menuntut adanya network governance, yakni koordinasi antar aktor negara dan non-negara dalam suasana kolaboratif. Oleh karena itu, penguatan mekanisme koordinasi-seperti forum lintas sektor, perencanaan terpadu, dan penggunaan sistem informasi terpadu-menjadi prasyarat penting dalam reformasi implementasi kebijakan.

Sering kali mplementasi terganjal oleh regulasi yang saling tumpang tindih atau bahkan kontradiktif. Fragmentasi peraturan perundang-undangan ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi pelaksana kebijakan dan membuka ruang interpretasi yang berbeda-beda antar daerah. Sebagai contoh, pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja menghadapi berbagai tantangan implementatif di daerah karena banyak aturan turunannya yang belum selesai, serta munculnya resistensi dari

kelompok masyarakat tertentu (Nurmandi & Purnomo, 2022). Situasi ini menunjukkan perlunya harmonisasi regulasi secara menyeluruh agar arah pelaksanaan kebijakan menjadi jelas dan konsisten. Ruang perbaikannya terletak pada penguatan fungsi koordinasi antar kementerian dalam menyusun regulasi turunan serta pelibatan *stakeholder* sejak tahap awal perumusan kebijakan agar produk hukum yang dihasilkan lebih operasional dan akomodatif.

Minimnya pelibatan masyarakat dalam proses implementasi kebijakan juga merupakan masalah yang signifikan. Kebijakan yang tidak melibatkan masyarakat cenderung gagal karena tidak sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal. Padahal, partisipasi publik menjadi prinsip utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). UNDP (2021) melaporkan bahwa hanya 28% dari masyarakat Indonesia yang merasa dilibatkan dalam perencanaan pembangunan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) sering kali bersifat simbolik dan tidak substantif.

Untuk memperbaiki kondisi ini, pemerintah perlu mendorong pendekatan *co-production* dan *co-creation*, di mana kebijakan dirancang dan dijalankan bersama dengan komunitas lokal, LSM, akademisi, dan pelaku usaha. Inovasi seperti *citizen charter*, konsultasi publik daring, dan forum warga dapat menjadi wadah penguatan partisipasi yang lebih inklusif dan bermakna (Fung, 2006).

Kebijakan publik di Indonesia sering kali dievaluasi berdasarkan input dan output, bukan pada hasil (*outcome*) atau dampak (*impact*). Evaluasi yang dilakukan cenderung administratif-mengukur seberapa besar anggaran diserap, bukan seberapa besar perubahan sosial yang terjadi.

Lemahnya sistem monitoring dan evaluasi (monev) ini menyebabkan kebijakan tidak mengalami pembelajaran berkelanjutan. Banyak kebijakan gagal tanpa dievaluasi penyebabnya secara mendalam, sehingga kesalahan yang sama diulang pada program berikutnya. Menurut Kementerian PANRB (2021), penguatan sistem monev berbasis hasil harus menjadi prioritas utama. Pemerintah perlu mengembangkan indikator kinerja utama (IKU) yang terukur dan berbasis data. Selain itu, hasil evaluasi harus terhubung langsung dengan proses pengambilan keputusan dan penyusunan anggaran berikutnya. Implementasi kebijakan di daerah

masih sangat bergantung pada desain dari pemerintah pusat. Banyak kebijakan tidak memberikan ruang yang cukup bagi pemerintah daerah untuk berinovasi atau menyesuaikan kebijakan dengan konteks lokal.

Ketergantungan ini sering mematikan inisiatif lokal dan memperlambat proses adaptasi kebijakan terhadap dinamika lokal. Padahal, prinsip desentralisasi menghendaki adanya otonomi daerah yang lebih luas dalam pengambilan keputusan. Sejalan dengan konsep *adaptive governance* (Djalante et al., 2011), seharusnya daerah diberi ruang lebih besar untuk menyesuaikan kebijakan dengan kapasitas lokal, terutama dalam kondisi darurat seperti pandemi atau bencana alam.

## **SIMPULAN**

Program makan bergizi gratis tidak hanya berfungsi sebagai intervensi sosial untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat, terutama anak-anak dan pelajar, tetapi juga membuka peluang strategis untuk memperkuat sektor ekonomi kerakyatan. Dengan melibatkan UMKM pangan sebagai mitra penyedia makanan dalam skema program ini, pemerintah dapat mendorong tumbuhnya permintaan stabil yang berdampak langsung pada peningkatan kapasitas produksi, omzet, dan daya saing pelaku usaha kecil.

Lebih jauh, program ini dapat memperkuat ekosistem ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja, penggunaan bahan baku lokal, dan peningkatan keterlibatan perempuan dalam ekonomi produktif. Namun demikian, untuk memastikan keberlanjutan dan dampak positifnya, diperlukan desain kebijakan yang menyeluruh, termasuk sistem pengadaan yang berpihak pada UMKM, pengawasan mutu yang terjangkau, dan kemitraan yang adil antara pelaku usaha dan pemerintah. Dengan perencanaan yang matang dan kolaborasi lintas sektor, program makan bergizi gratis memiliki potensi besar sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan yang tidak hanya menyehatkan generasi penerus bangsa, tetapi juga memberdayakan ekonomi masyarakat dari bawah secara nyata dan berkelanjutan.

## **DAFTAR PUSTAKA**



- Badan Pusat Statistik. (2023). *Keadaan ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2023*. Jakarta: BPS.
- Bappenas. (2021). *Laporan tahunan pembangunan nasional*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Djalante, R., Thomalla, F., Sinapoy, M. S., & Carnegie, M. (2011). Adaptive governance and managing resilience to natural hazards in Indonesia. *International Journal of Disaster Risk Science*, 2(3), 1–14. <https://doi.org/10.1007/s13753-011-0013-6>
- Dwiyanto, A. (2018). *Reformasi birokrasi publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- FAO. (2021). *The state of food and agriculture: Making agrifood systems more resilient to shocks and stresses*. Rome: FAO.
- Fung, A. (2006). Varieties of participation in complex governance. *Public Administration Review*, 66(s1), 66–75. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00667.x>
- Kementerian Ketenagakerjaan RI. (2023). *Laporan tahunan program padat karya tunai*. Jakarta: Kemenaker.
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2022). *Laporan tahunan UMKM Indonesia*. Jakarta: Kemenkop UKM.
- Kementerian PANRB. (2021). *Panduan evaluasi berbasis hasil untuk instansi pemerintah*. Jakarta: Kementerian PANRB.
- Kementerian Pertanian RI. (2021). *Laporan kehilangan hasil pasca panen hortikultura*. Jakarta: Badan Litbang Pertanian.
- Kusnadi, R. (2020). Akses pembiayaan dan implikasinya terhadap kapasitas produksi UMKM pangan. *Jurnal Manajemen Usaha Kecil*, 18(1), 33–45.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Beverly Hills, CA: Sage.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and public policy*. Glenview, IL: Scott Foresman.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.)*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Neuman, W. L. (2014). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches*. Pearson Education.
- Nurmandi, A., & Purnomo, E. P. (2022). Kebijakan Omnibus Law dan konflik implementasinya di daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 11(2), 87–105.

- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative research and evaluation methods (3rd ed.)*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Peters, B. G., & Pierre, J. (2005). *Governing complex societies: Trajectories and scenarios*. London: Palgrave Macmillan.
- Prasetyo, Y., & Firmansyah, A. (2022). Digitalisasi dan dinamika pekerjaan baru di era ekonomi gig. *Jurnal Ekonomi Digital Indonesia*, 4(1), 45–60.
- Rifin, B., Setiawan, A., & Haryono, R. (2022). Digitalisasi rantai nilai pertanian: Studi kasus platform TaniHub. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 19(1), 25–40.
- Saptana, Susilowati, S. H., & Hidayat, B. (2020). Penguatan kelembagaan petani dalam rantai pasok komoditas strategis. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 38(2), 123–140.
- Simatupang, P., & Purwanto, E. (2020). Efisiensi rantai pasok beras di Indonesia: Permasalahan dan rekomendasi. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 18(1), 45–58.
- Tambunan, T. (2019). *Usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia: Isu dan kebijakan*. Jakarta: LP3ES.
- Tambunan, T. (2020). *Usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia: Peran dan tantangan dalam penciptaan lapangan kerja*. Jakarta: LP3ES.
- UNDP Indonesia. (2021). *Citizen engagement and inclusive governance report*. Jakarta: UNDP Indonesia.
- Wibowo, R., & Saraswati, D. (2021). Transformasi digital UMKM: Studi empiris di masa pandemi COVID-19. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 24(2), 150–162.
- World Bank. (2020). *Indonesia civil service competency assessment report*. Washington, DC: World Bank.
- World Bank. (2022). *Indonesia economic prospects: Skills for the future*. Washington, DC: World Bank Group.